Prabowo Gencar Basmi Tambang Ilegal .....

Dari Halaman 1

kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan kerugian negara diperkirakan Rp300 triliun.

Pabrik pemurnian yang disita Kejaksaan Agung antara lain PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) di Pangkal Pinang, PT Venus Inti Perkasa di Pangkal Pinang, PT Sariwiguna Bina Sentosa di Pangkal Pinang, serta PT Tefind Bangka Tin (RBT) di Kabupaten Bangka.

Presiden menyatakan, keberhasilan ini sebagai prestasi bersama antara penegak hukum dan aparat pertahanan negara.

Prabowo menegaskan, operasi serupa akan terus berlanjut di daerah lain guna memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Jadi, ini suatu bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekad untuk memberantas penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum," katanya.

Dalam kesempatan berbeda pada September lalu, Prabowo telah memerintahkan TNI, Polri dan Bea Cukai untuk menggelar operasi besar-besaran di Bangka Belitung dengan sasaran menutup jalur yang selama ini menjadi celah penyelundupan hasil timah.

"Hampir 80 persen hasil timah, setiap tahun diselundupkan," kata Presiden.

Hasil tambang ilegal itu diselundupkan dengan menggunakan alat transportasi kapal hingga sampan.

"Kita tutup dan nyelundupnya macam-macam, ada yang pakai kapal, ada yang pakai feri, sekarang tutup, tidak bisa keluar, sampan pun tidak bisa keluar," katanya.

Prabowo memperkirakan upaya penertiban tambang ilegal yang akan terus diperluas mampu menyelamatkan uang negara hingga Rp22 triliun hingga akhir tahun.**(ant/js)**

Wartawan Jadi Korban Kekerasan dan Intimidasi .....

Dari Halaman 1

impanan cangkang, menggelar demonstrasi di Jalan Besar Patumbak, Dusun I, Desa Patumbak Kampung.

Ketegangan meningkat saat sekelompok pemuda yang diduga preman menghalangi aksi warga dan memaksa karyawan PT UG untuk masuk. Aksi dorong-mendorong tak terhindarkan di depan pintu masuk pabrik.

Ironisnya, aksi unjuk rasa ini justru menjadi ajang kekerasan terhadap jurnalis. Puluhan pemuda tak dikenal menghalang-halangi wartawan yang sedang meliput. Seorang wartawan media online, DL, nyaris kehilangan ponselnya akibat dorongan dan tepisan tangan. Lebih parah lagi, seorang wartawan media cetak dan online terbitan Medan, ES, dipukul helm oleh oknum preman hingga mengenai wajah dan kepala.

Para pelaku intimidasi juga melontarkan kata-kata kotor dan menantang wartawan untuk berkelahi. "Apalagi kau. Mau ribut lagi kau. Gak sor kau, main kita," ujar DL menirukan ucapan seorang oknum yang dikenal dengan panggilan Aseng.

Pria bertopi pet itu bahkan menantang wartawan, demonstran, dan warga sekitar untuk berduel demi membela kepentingan mereka di PT UG.

Aparat penegak hukum dari Polsek Patumbak dan Koramil 15/DT yang berada di lokasi, hanya terpantau diam dan seolah menjadi penonton. Padahal, aksi demo tersebut berada di wilayah hukum mereka.

Korban kekerasan, ES, akan melaporkan puluhan oknum OKP tersebut ke pihak kepolisian Polsek Patumbak, guna pertanggungjawaban atas tindakan mereka.**(A-10)**

Adik Jusuf Kalla Terjerat Korupsi Proyek PLTU .....

Dari Halaman 1

Dirut PLN periode 2008-2009 Fahmi Mochtar (FM) sebagai tersangka.

Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Cahyono Wibowo menyebut total ada empat orang tersangka yang ditetapkan penyidik dalam proses gelar perkara, pada Jumat (3/10) kemarin.

"Tersangka FM (Fahmi Mochtar) sebagai Direktur PLN saat itu, pihak swasta HK (Halim Kalla) selaku Presiden Direktur PT BRN, RR selaku Dirut PT BRN dan HYL selaku Dirut PT Praba," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (6/10).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Totok Suharyanto menjelaskan proyek pembangunan PLTU Kalbar ini terdapat penyalahgunaan wewenang hingga berujung mangkrak sejak 2016.

Totok menjelaskan meskipun telah diberikan perpanjangan waktu melalui amandemen kontrak sebanyak 10 kali sampai dengan 2018, proyek PLTU itu tetap tidak berhasil diselesaikan dan bisa dimanfaatkan.

Ia mengatakan kasus ini bermula ketika PLN menggelar lelang pembangunan PLTU dengan sumber pembiayaan kredit komersial.

"Akan tetapi sebelum pelaksanaan lelang itu, diketahui bahwa pihak PLN melakukan permufakatan dengan pihak calon penyedia dari PT BRN dengan tujuan memenangkan PT BRN dalam Lelang PLTU 1 Kalbar," jelasnya.

Selanjutnya dalam pelaksanaan lelang, panitia pengadaan PLN meloloskan dan memenangkan KSO BRN, Alton dan OJSC meskipun tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis.

Selain itu, penyidik juga menemukan indikasi bahwa perusahaan Alton dan OJSC tidak pernah tergabung dalam KSO yang dibentuk dan dikepalai PT BRN. Setelahnya pada 2009, KSO BRN mengalihkan pekerjaannya kepada PT PI tepat sebelum melaksanakan tanda tangan kontrak.

"Termasuk penguasaan rekening KSO BRN, dengan kesepakatan pemberian imbalan (fee) kepada pihak PT BRN," tuturnya.

"Pada saat dilaksanakan tanda tangan kontrak pada tanggal 11 Juni 2009, PLN belum mendapat pendanaan, dan mengetahui KSO BRN belum melengkapi persyaratan," imbuhnya.

Totok menjelaskan hingga batas berakhirnya kontrak pada 28 Februari 2012, KSO BRN dan PT PI baru mengerjakan total 57 persen proyek. Sementara setelah dilakukan amandemen kontrak hingga 31 Desember 2018, proyek masih belum diselesaikan atau baru mencapai 85,56 persen.

Ia menyebut KSO BRN dan PT PI beralasan proyek itu tidak bisa diselesaikan dengan dalih keuangan yang tidak mencukupi. Akan tetapi, kata dia, ditemukan adanya alirantransaksi keuangan dari rekening KSO BRN yang berasal dari pembayaran proyek kepada para tersangka.

"Bahwa KSO BRN telah menerima pembayaran dari PT PLN sebesar Rp323,19 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan sebesar USD62,4 juta untuk pekerjaan Mechanical Electrical," tuturnya.

Atas perbuatannya, Cahyo mengatakan pembangunan PLTU 1 Kalbar belum juga selesai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh PLN. Sebagian besar kondisi bangunan dan peralatan juga terbengkalai, rusak dan berkarat.

"Total kerugian keuangan negaranya dengan kurs yang sekarang Rp1,35 triliun," jelasnya.**(cnni/js)**

Jaksa: Ada 2, Bahkan 4 Alat Bukti .....

Dari Halaman 1

Nadiem di PN Jaksel, pada Senin (6/10). Dalam agenda eksepsi itu, Jaksa menyebut penetapan status Nadiem sebagai tersangka didasari 4 alat bukti.

"Termohon selaku penyidik telah mendapatkan permulaan tercukupinya minimal 2 alat bukti, bahkan diperoleh 4 alat bukti," ujar salah satu jaksa dalam sidang eksepsi.

Ia menyebut keempat alat bukti itu mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat hingga bukti elektronik. Ia mengatakan sebanyak 113 saksi termasuk Nadiem yang saat itu memang belum ditetapkan sebagai tersangka, telah diperiksa.

Selain saksi, Kejagung mengaku telah meminta pendapat dari ahli keuangan negara, ahli administrasi negara, ahli pengadaan barang dan jasa hingga ahli hukum pidana.

Tak hanya itu, Kejagung mengklaim telah memiliki bukti dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait adanya kerugian negara dalam proyek pengadaan Chromebook tersebut.

"Hasil ekspose antara penyidik dengan auditor BPKP menghasilkan kesimpulan pada pokoknya bahwa terdapat perbuatan melawan hukum dalam pengadaan TIK," jelasnya.

Dengan pelbagai bukti itu, penyidik akhirnya menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Oleh sebab itu, Kejagung menegaskan penetapan tersangka Nadiem telah sesuai dengan prosedur.

"Setelah pemohon yang pernah calon tersangka diperiksa sebagai saksi serta telah diperoleh alat bukti lainnya berupa alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, maupun alat bukti elektronik, termohon selaku penyidik melakukan proses penetapan tersangka pemohon," pungkasnya

Kejagung sebelumnya menetapkan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022. Selama periode itu, Kemendikbud mengadakan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah-sekolah di Indonesia khususnya di daerah 3T dengan total anggaran mencapai Rp9,3 triliun.

Pengadaan laptop ini dipilih menggunakan sistem operasi Chrome atau Chromebook meskipun memiliki banyak kelemahan dan tidak efektif untuk sarana pembelajaran pada daerah 3T karena belum memiliki akses internet.

Selain Nadiem, Kejagung juga menetapkan empat orang tersangka yakni Direktur SMP Kemendikbudristek 2020-2021, Mulyatsyah; Direktur SD Kemendikbudristek 2020-2021, Sri Wahyuningsih; Mantan stafsus Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan; dan Mantan Konsultan Teknologi pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief.

Atas perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp1,98 triliun yang terdiri dari kerugian akibat Item Software (CDM) sebesar Rp480 miliar dan mark up harga laptop sebesar Rp1,5 triliun.**(cnni/js)**

Perjalanan Dinas Anggota DPRD Medan 2023 .....

Dari Halaman 1

2024 yang dilakukan ke beberapa kota, seperti ke Medan, Banda Aceh, Takengon, Pekanbaru, Jakarta dan Bogor ada total kelebihan bayar Rp 7.609.326.799 dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga saat ini, berdasarkan LHP BPK RI tahun 2025, sebesar Rp4.431.673.699 masih menggantung atau masih belum dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Dalam rincian yang tertera di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu, dari 1.120 kali perjalanan dinas yang dilakukan sepanjang tahun 2023, sejumlah anggota dewan justru tidak menginap di hotel sesuai surat perintah tugas (SPT) yang diterbitkan.

Bahkan, hasil konfirmasi yang dilakukan auditor BPK, sejumlah anggota dewan menginap dengan bill hotel yang lebih tinggi ketimbang uang yang diterima pihak hotel.

Dari hasil akumulasi itu, dalam hasil temuan BPK RI terdapat pelaksana perjalanan dinas yang tidak menginap, tarif hotel tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban.

Selain itu, kelebihan bayar juga terjadi akibat biaya transportasi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 261.500.000. Biaya kelebihan bayar biaya transportasi ini merupakan akumulasi dari 262 kali perjalanan dinas yang dilakukan oleh 3 pimpinan DPRD Medan periode 2019-2024, yakni inisial HS, IR dan TB.

Sebagaimana diketahui pada APBD 2023, untuk perjalanan dinas 50 Anggota DPRD Medan, Pemko Medan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 55,276 miliar.

Dari anggaran itu, sebesar Rp 7.609.326.799 menjadi temuan karena kelebihan bayar. Dimana, Rp 3,177 miliar sudah dikembalikan ke kas daerah.

Sedangkan hingga saat ini, berdasarkan LHP BPK RI tahun 2025, sebesar Rp 4.431.673.699 masih menggantung atau masih belum dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Atas kelebihan bayar uang perjalanan dinas yang belum dikembalikan itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) pun melakukan penyelidikan.

Plh Kasi Penkum Muhammad Husairi bahkan menyebut untuk melengkapi keterangan dalam penyelidikan itu pihaknya tidak menutup ruang untuk melakukan pemanggilan sejumlah pihak termasuk Sekwan DPRD Medan, M Ali Sipahutar.

"Terkait informasi kelebihan bayar perjalanan dinas di DPRD Medan, dapat saya sampaikan bahwa laporan tersebut sedang dalam tahap penyelidikan," katanya kepada medanbisnisdaily.com Senin (6/10/2025).

Dikatakan,pemanggilan pihak terkait termasuk Sekwan DPRD Medan akan dilakukan sesuai kebutuhan klarifikasi dan mekanisme hukum yang berlaku.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemko Medan, Muhammad Ashari Lubis ketika dikonfirmasi soal kasus kelebihan bayar [erjalanan dinas anggota DPRD meminta medanbisnisdaily.com untuk melakukan konfirmasi ke Inspektorat Medan.

"Kalau itu ke inspektorat ya bang, tindak lanjut temuan BPK ada di Inspektorat," katanya singkat.**(mbc/js)**

Kota yang Lupa pada Aturannya .....

Dari Halaman 1

tah bicara ketegasan, tapi yang tampak justru kelenturan. Bangunan yang tak punya izin bisa berdiri kokoh, sementara rakyat kecil yang salah menaruh gerobak justru diseret petugas.

Centre Point hanyalah simbol. Dari sanalah lahir generasi baru pelanggaran yang lebih percaya diri, seperti City View, yang menjulang tanpa malu. Mungkin mereka belajar dari yang lebih dulu ada. Di Medan, seakan melanggar aturan bukan dosa, asalkan bisa berbagi hasilnya dengan yang berwenang.

Padahal, dalam pandangan Islam, menegakkan aturan bukan sekadar urusan administrasi, tapi bagian dari amanah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kamu adalah karena apabila orang terpandang mencuri, mereka biarkan; dan bila orang kecil yang mencuri, mereka tegakkan hukum atasnya."

Bukankah itu yang sedang terjadi di kota ini? Hukum ditegakkan bila yang salah rakyat biasa, tapi menjadi longgar bila pelanggar punya kuasa.

Seorang kawan pernah berkata, "Hukum itu seperti pintu otomatis di mal. Ia terbuka kalau yang datang punya uang." Kata-kata itu lucu, tapi getir. Sebab bila hukum sudah bisa disesuaikan, keadilan akan kehilangan arah. Dan di saat itu, bangunan-bangunan tanpa izin akan terus berdiri, bukan karena kokoh betonnya, tapi karena rapuhnya nurani kita.(*)

Gedung DPR .....

Dari Halaman 1

Selain demo BEM UI di depan Gedung DPR/MPR, ada tiga pemberitahuan unjuk rasa lain yang diterima kepolisian.

Kegiatan itu di antaranya, demo BEM Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir, demo dari Asosiasi Cendekia Muda Indonesia di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dan demo BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Fisip Universitas Ibnu Chaldun Jakarta di DPP PKB.

"Kami imbau peserta aksi tetap santun, tertib, dan tidak terpancing provokasi," ucap Susatyo.

Dalam unggahan akun Instagram @bemui_official, demo yang digelar hari ini bertajuk Rapat Dengar Pendapat Warga (RDWP).

Aksi ini membawa sejumlah tuntutan, yakni menuntut pemerintah dan kepolisian membebaskan kawan-kawan yang masih ditahan terkait aksi demo akhir Agustus lalu.

Selain itu juga mendesak aparat dan seluruh institusi penegak hukum untuk menghentikan tindakan represif, intimidatif dan upaya kriminalisasi terhadap massa aksi yang memperjuangkan keadilan dan hak-hak rakyat.**(cnni/js)**

Prabowo Instruksikan .....

Dari Halaman 1

kediamannya di Kartanegara IV, Jakarta, Minggu (5/10) malam.

"Menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit," tulis Seskab Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip Senin (6/10).

Teddy mengatakan tes kit itu meliputi pengecekan kebersihan makanan dan alat pencuci dan pengering alat makan yang higienis yang dilengkapi air hangat.

"Dan alat khusus untuk menghindari bakteri, dan penyediaan filter air bersih," ucapnya.

Belakangan kasus keracunan akibat menyantap menu makan bergizi gratis tengah marak. Higienitas SPPG jadi salah satu hal yang disorot pada kasus ini.

Dalam pidato sebelumnya, Prabowo juga sempat menekankan akan pentingnya tes kit bagi seluruh SPPG.

Prabowo mengatakan hal itu penting untuk mencegah terjadinya kasus keracunan di masa yang akan datang.

"Kita juga perintahkan semua dapur harus punya tes kit, alat uji sebelum distribusi harus diuji semuanya, dan langkah-langkah preventif lainnya," ucap dia.

Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya alat pencuci modern yang digunakan oleh seluruh SPPG ke depannya.

"Kita tertibkan semua SPPG, semua dapur kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat yang modern tidak terlalu mahal untuk membersihkan, membunuh semua bakteri," jelasnya.**(cnni/js)**

Tambang Ilegal yang Dilegalkan

Dari Halaman 1

ilegal di Indonesia justru bertahan karena ia hidup di bawah perlindungan tiga lapisan kekuasaan: elite politik dan ekonomi di atas, birokrasi permisif di tengah, serta masyarakat bergantung di bawah. Dalam struktur ini, tambang ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan bagian dari ekonomi bayangan yang dilegalkan oleh pembiaran.

Lapisan pertama adalah perlindungan elite. Banyak laporan investigatif menunjukkan bahwa aktivitas tambang ilegal terhubung dengan jaringan pemodal besar, pengusaha ekspor, bahkan oknum aparat keamanan. Operasi tambang sering kali dilakukan di wilayah konsesi resmi, namun hasilnya dijual melalui jalur gelap. Ketika penegakan hukum hanya berhenti di operator lapangan, sementara pemodal di balik layar tak tersentuh, pesan yang muncul jelas: hukum masih tunduk pada kekuasaan modal.

Lapisan kedua adalah birokrasi yang tumpang tindih dan koruptif. Regulasi pertambangan melibatkan banyak instansi ESDM, KLHK, pemerintah daerah, hingga lembaga penegak hukum. Koordinasi yang lemah dan celah aturan membuat banyak wilayah tambang berada di zona abu-abu: izin eksplorasi tanpa izin produksi, atau izin kadaluarsa yang tetap dijalankan. Dalam situasi seperti ini, "uang koordinasi" sering lebih efektif daripada surat izin resmi. Maka, tambang ilegal bukan karena tidak diawasi, melainkan karena pengawasannya bisa dinegosiasikan.

Lapisan ketiga adalah masyarakat lokal yang terjebak ekonomi tambang. Bagi sebagian warga di daerah tambang, aktivitas ini bukan kejahatan, melainkan sumber hidup. Ketika pilihan kerja terbatas, tambang menjadi jalan pintas untuk bertahan hidup. Negara sering hadir sebagai penertib, tapi jarang sebagai penyedia alternatif ekonomi. Akibatnya, ketika alat berat disita, yang paling menderita justru warga kecil yang tidak punya tabungan, bukan pemodal besar yang bersembunyi di balik perusahaan cangkang.

Tambang ilegal juga terus hidup karena dorongan pasar global. Selama harga timah, nikel, dan emas tinggi, permintaan ekspor akan selalu ada. Jaringan internasional pembeli hasil tambang tidak peduli apakah barang yang mereka beli berasal dari tambang legal atau tidak. Ini menjadikan tambang ilegal sebagai bagian dari rantai ekonomi dunia yang hipokrit: keuntungan mengalir ke luar negeri, kerusakan lingkungan dan sosial tinggal di dalam negeri.

Masalah ini semakin rumit ketika transparansi data tambang hampir nihil. Publik tidak tahu siapa pemilik izin, berapa luas lahan, dan ke mana hasil tambang dijual. Tanpa keterbukaan, sulit bagi masyarakat sipil dan media untuk melakukan pengawasan. Dalam gelap seperti inilah mafia tambang tumbuh subur dilindungi oleh data yang disembunyikan.

Kini, pemerintahan baru berjanji akan menertibkan tambang ilegal. Optimisme tentu perlu, tetapi dengan syarat: penegakan hukum harus menyentuh aktor besar, bukan sekadar sopir alat berat; data izin tambang harus dibuka; dan masyarakat lokal harus diberi pilihan ekonomi yang manusiawi. Tanpa itu, penertiban hanya menjadi panggung pencitraan, bukan reformasi nyata.

Tambang ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum ia adalah cermin ketimpangan moral antara mereka yang berkuasa dan mereka yang bergantung. Menertibkan tambang berarti bukan hanya menutup lubang di tanah, tetapi juga menutup lubang dalam sistem keadilan kita sendiri.